

Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik

Nofal Liata 

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda
Aceh, Indonesia

Korespondensi: nofalliata@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Studi Literatur

Sitasi Cantuman:

Liata, N. (2020). Relasi
Pertukaran Sosial antara
Masyarakat dan Partai Politik.
*Jurnal Sosiologi Agama
Indonesia (JSAI)*, 1(1), 79-95

**Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh JSAI**

Dikirim: 12 Februari 2020
Diterima: 28 Maret 2020
Dipublikasi: 31 Maret 2020

ABSTRAK

The study aims to discuss the social exchange relationship "symbiotic mutualism" mutual benefit between society and political parties. The author sees, the community's perspective saw political activity it is still perceived as something dirty, tends to apathy, not as a means of political struggle to make a profit. The purpose of this study is to uncover more conceptual facts of favorable relationships to two parties so that political activity is then a place of healthy and conducive struggle, which is not contrary to the rules of the law. The method of collecting data in this study is to use the primary data of political sociology core literacy, then to use secondary data on the relevance of social reality to strengthen primary data. This study of the symbiotic mutualism relationship is very beneficial to build the political awareness of the community and the elite of political parties to support development, whether it is the development of material and non-material, so that political activities become beneficial for all circles, not even in the left.

Keywords: Social exchange, political activities, Society

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang hubungan pertukaran sosial “simbiosis mutualisme” saling menguntungkan antara masyarakat dan partai politik, di mana penulis melihat sejauh ini dalam perspektif masyarakat kegiatan politik itu masih di anggap sebagai sesuatu yang kotor, cenderung apatis, bukan sebagai sarana perjuangan politik untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan studi ini untuk mengungkap lebih banyak fakta konseptual hubungan-hubungan yang menguntungkan ke dua belah pihak, sehingga kegiatan politik itu kemudian menjadi tempat sarana perjuangan yang sehat dan kondusif, yang tidak berseberangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah menggunakan data primer dari literasi pokok sosiologi politik, kemudian menggunakan data sekunder berupa realitas sosial yang relevan untuk memperkuat data primer. Kajian ini hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan ini sangat berguna untuk membangun kesadaran politik masyarakat dan elit partai politik guna menunjang pembangunan, baik itu pembangunan secara materi dan non materi, sehingga kegiatan politik itu benar-benar menjadi bermanfaat untuk semua kalangan, bukan malah di tinggalkan.

Kata Kunci: *Pertukaran sosial, Kegiatan politik, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan termasuk negara menganut demokrasi, organisasi partai politik sudah menjadi instrumen syarat mutlak untuk menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Partai politik sangat besar perannya dalam mengantarkan kelompok tertentu di puncak kekuasaan, baik itu ketika pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Reformasi yang bergulir di Indonesia semenjak tahun 1998 secara pelan-pelan mengubah wajah perpolitikan secara nasional. Pasca reformasi, di tahun 1999 adalah pemilu pertama di mana masyarakatnya merasakan kebebasan berpolitik, berpendapat dan memilih.

Perbaikan tahap demi tahap terus terjadi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. hal ini terlihat dari Undang-undang No. 12 Tahun 2003, namun masih dianggap oleh sebahagian kalangan perlu ada perbaikan (Tawakkal, 2009). Walaupun demikian, kehadiran UU ini telah memberikan semangat baru yaitu memilih langsung wakil rakyatnya. Dan UU no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelum adanya dua UU ini, para anggota DPRD/DPRI sangat tergantung mekanisme partai untuk bisa terpilih, namun setelah adanya UU ini maka dinamika politiknya pun berubah. Di mana figur, kinerja, dan finansial para caleg akan mempengaruhi secara signifikan perolehan suara partai.

Melihat apa yang terjadi masyarakat berkaitan dengan UU itu sendiri, elit partai politik dan masyarakat sebagai basis suara. Satu sama lain akan saling mempengaruhi, dipengaruhi, demikian juga sebaliknya. Partai politik membutuhkan suara pendukung, begitu juga masyarakat membutuhkan saluran perjuangan politis untuk memperbaiki nasibnya. Keadaan seperti inilah yang kemudian menciptakan hubungan simbiosis

mutualisme yang saling menguntungkan dalam perpolitikan. Elit Partai politik memberikan beberapa hal-hal tertentu (materi dan non-materi) kepada masyarakat basis suaranya itu, serta menerima keuntungan dari masyarakat ini. Sedangkan masyarakat memberikan dukungannya dalam bentuk tertentu (materi dan non-materi) kepada elit partai politik, dan masyarakatnya ini menerima keuntungan, bisa dalam bentuk fisik dan non-fisik.

Hubungan simbiosis mutualisme yang saling mendapatkan keuntungan partai politik dengan masyarakat, yang mudah terlihat adalah seperti kehadiran partai politik di tangan-tengah masyarakat dalam bentuk pendampingan masyarakat, elit partai politik melakukan berbagai kegiatan seperti: bakti sosial, pemberdayaan karang taruna. Selain itu elit partai politik juga merealisasikan janji mereka dengan menghadirkan di pembangunan fasilitas umum infrastruktur-infrastrukturnya (perbaikan jalan misalnya, pengecoran parit, pemasangan lampu gratis, pengecatan mushalla, budidayakan ikan dan lain sebagainya). Semua upaya oleh elit partai politik ini bukanlah semata pemberian secara gratis, di balik semua itu di antara elit partai politik dengan masyarakat telah melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah berupa keuntungan untuk masing-masing kemudian atas kegiatan hubungan politik.

Sudut lain, sebab terjadinya transaksi politik praktis atau hubungan “pertukaran yang saling mendapatkan keuntungan” tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat yang berpendapatan rendah, (kondisi kemiskinan). Salah satu dari kesimpulan Ahmad Zuber mengenai kemiskinan, ia mengatakan bahwa “kemiskinan adalah fungsional dalam sistem sosial karena menekankan status-status dalam masyarakat yang di nilai dapat menunjang kesinambungan masyarakat.” (Zuber, 2012). Jadi antusiasme tidak semata-mata dikarenakan faktor kesamaan ideologi antara partai dengan masyarakatnya, keuntungan dalam hubungan tersebut juga menjadi magnet utama, di karenakan kondisi kampanye adalah dimana saatnya organisasi politik menghamburkan uang, maka uang tersebut yang di keluarkan harus setara dengan jumlah dukungan suara yang dibutuhkan.

Pola hubungan terbangun berkaitan dengan kepentingan partai Politik dan kepentingan masyarakat, sangat berkemungkinan ada pertimbangannya “upah-hadiah” atau reward. Hal yang demikian merupakan realitas yang tidak bisa di hindari, terlebih-lebih masyarakat yang serba materialis sekarang ini, sehingga yang mendasari perilaku adalah pertimbangan ekonomis dan kenyamanan psikologis. lebih luas lagi oleh George C. Homans menyampaikan bahwa “yang di pertukarkan tidak hanya uang, tetapi juga barang-barang lain, seperti: penerimaan, kerelaan, martabat, cinta, perasaan dan lain sebagainya yang bukan materialistis (Susilo, 2008). Penulis menambahkan juga, bahwa aktivitas keagamaan dan kebudayaan juga dapat di pertukarkan guna mendapatkan keuntungan yang dikemas secara menarik.

Dalam keseharian masyarakat, hampir semua interaksi sosial baik individu sesama individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok sulit

melepaskan orientasi kepentingan. Dalam konteks yang demikian, segala sesuatu hubungan selalu akan di ukur berdasarkan untung rugi. Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik atau *reciprocity*. *Reciprocity* adalah persetujuan untuk saling memberi dan menerima, atau menjual dan membeli, keadaan saling berbalas. Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang, hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.

B. Metode

Metode dalam kajian ini adalah menggunakan studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam kajian kali ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yakni; literatur pokok yaitu sosiologi politik sebagai sumber primer. dan Sumber data sekunder yaitu: sumber data realitas sosial yang penulis temukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui media surat kabar, ataupun melalui diskusi

C. Hasil dan Pembahasan

Pemimpin atau di sebut juga *leader*, adalah orang yang mampu mempengaruhi (*influence*) orang lain dan memiliki wewenang manajerial. Kepemimpinan atau di sebut juga *leadership* adalah proses mempengaruhi (*process of influencing*) orang lain dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasinya. Sedangkan pemimpin efektif (*effective leader*), teori kepemimpinan transaksional (*transactional leadership theory*) mengatakan bahwa pemimpin efektif adalah pemimpin transaksional (*transactional leader*) (Arrizal, 2012).

Dalam Arrizal yang dikutip dari Yukl, (2002) menjelaskan pemimpin transaksional ialah pemimpin yang memimpin para pengikut (*leads followers*) untuk kepentingan diri pemimpin melalui proses pertukaran (*exchange process*). Ciri pemimpin transaksional yaitu memimpin para pengikut melalui proses pertukaran. Contohnya, pemimpin transaksional yaitu pemimpin politik (*political leaders*) atau ketua partai politik, dan pemimpin perusahaan (*corporate leaders*). Pemimpin politik melakukan proses pertukaran dengan cara, menukar suara pemilih yang mendukungnya dalam pemilihan umum dengan jabatan, dan program pembangunan pemerintah. Pemimpin perusahaan seperti presiden direktur, atau *Chief Executive Officer* (CEO) melakukan proses pertukaran dengan cara, menukar kemampuan kerja dengan kemauan kerja atau menukar profesionalisme dengan imbalan kerja mendapat kompensasi (Arrizal, 2012).

1. Pengertian Politik

Selama Manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*) selama itu pula kita menemukan politik. Ibnu Khaldun mengatakan manusia dari *naturenya* adalah makhluk

yang berpolitik” (Mahfud, 2009). Kata politik, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polis*. Polis berarti warga kota. Orang yang mendiami polis adalah disebut *polites*, *Polites* berarti warga negara. *Politikos* artinya kewarganegaraan. Dari istilah ini muncullah *politike tecne* yang berarti kemahiran berpolitik. *Ars politika* yang berarti kemahiran dalam tentang soal kenegaraan. *Politike episteme* berarti ilmu politik. Dari kata inilah kata politik yang kita gunakan saat sekarang (Philipus & Aini, 2004)

Sedangkan definisi-definisi politik diantaranya dari para ahli adalah: *Pertama* dari Mariam Budiarto (1992) mendefinisikan politik sebagai “bermacam kegiatan yang terjadi di suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana menentukan tujuan itu.” Dalam definisi ini Mariam mengartikan politik sebagai tindakan beraneka ragam dilakukan oleh penguasa maupun masyarakatnya. *Kedua* dari Maurice Duverger (1982), ia mengatakan hakikat politik sebagai ambivalen. Satu sisi politik konflik untuk meraih kekuasaan, disisi lain usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Dan *ketiga* dari Niccolo Machiavelli, yang menyebutkan tujuan dari semua berpolitik adalah mengamankan kekuasaan. Menurut Machiavelli pemegang kekuasaan bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral, ia menepatkan politik dan moralitas sebagai dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Dalam urusan politik tidak ada tempat untuk membicarakan moral, hanya satu hal yang terpenting dalam politik yaitu bagaimana meraih sukses merebut dan mempertahankan kekuasaan (Mahfud, 2009).

2. Partai Politik

Salah satu karakteristik dasar dari sebuah negara yang demokratis, sebagai mana dikemukakan oleh Robert A. Dahl (1971), adalah adanya kebebasan di dalam membentuk organisasi, termasuk partai Politik. Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokratis. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokratis, seperti dikatakan oleh Schattschneider (1942) “*political parties created democracy*” (Ashiddiqie, 2005). Jimly Ashiddiqie menambahkan bahwa, partai merupakan pilar sangat penting untuk di perkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Walaupun demikian, sisi gelap partai politik pun jadi rahasia umum, ketika hawa nafsu dunia, keserakahan dan ambisi buta yang menutup akal sehat, menguasai elit dan partai, petakapun harus di terima oleh negara dan masyarakat luas. Tidak heran jika ada pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik. Pandangan lain juga menilai bahwa partai politik tidak lebih sebagai kendaraan politik bagi segelintir elit politik untuk mengumpulkan keuntungan dirinya dan golongannya semata.

Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara sosial maupun secara ekonomi, moral maupun materiil. Cara mengemukakan keinginan

rakyat melalui parpol mengandung pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian, suatu partai politik hanya dapat ada dengan sesungguhnya jika ada sekurang-kurangnya satu kelompok lain sebagai penyeimbang (Philipus & Aini, 2004).

Berikut ini beberapa definisi partai politik dari para ahlinya, yaitu; *pertama* dari Maurice Duverger, (1985) ia mengatakan Partai politik kelompok manusia mempunyai doktrin sama. Kedua dari Miriam Budiardjo, (1992) mengatakan Partai politik; sekelompok yang terorganisasi, anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Dan *ketiga* perspektif Menurut Undan-undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

3. Peran Elit Politik

Istilah “elite” pertama kali digunakan dalam abad ke tuju belas untuk menyebutkan barang dagangan yang mempunyai kemampuan khusus. Istilah tersebut kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok sosial tinggi, seperti kesatuan militer utama atau bangsawan atas. Yang mengulas secara lengkap “elit dan masyarakat” adalah T.B. Bottomore dalam bukunya berjudul *Elite and Society* (Soelaeman, 1995). Definisi elit bertitik tolak dari adanya ketidaksamaan bakat-bakat individu dalam setiap lapisan kehidupan sosial, dan menurut pemikiran Plato, suatu komunitas harus diperintahkan oleh individu-individu yang lebih unggul atau superior.

Vilfredo Pareto menggunakan istilah elit yaitu untuk menjelaskan adanya ke tidak setaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial, dikutip oleh (Jumari, 2012). Pareto percaya bahwa dalam setiap masyarakat di perintahkan oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang dibutuhkan bagi kehidupan mereka. Mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah merupakan yang terbaik dan di kenal sebagai elit. Dengan demikian elit adalah orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Dalam konteks sekarang, penggunaan istilah “elite” di gunakan juga menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan status tinggi. Lebih lanjut, Pareto dalam Bottomore (1996) membagikan elit dua kategori, yaitu elit yang memerintah (*governing elite*) terdiri dari individu-individu secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintah, dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).

Konsep elit politisi dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai orang beraktivitas untuk memengaruhi orang lain, mendapatkan atau menduduki suatu jabatan politik, yaitu jabatan diperoleh karena ada kaitannya dengan keputusan politik,

misalnya jabatan presiden, DPR, menteri, kepada daerah, Mahkamah Agung, MK, ketua Kejaksaan Agung, dan lain sebagainya (Damsar, 2010).

Dalam hal ini elit berkaitan dengan seberapa besar kekuasaannya berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Untuk mengkaji elit politik perlu di perhitungkan beberapa hal (Philipus & Aini, 2004): (1) Ruang lingkup kekuasaan. (2) kualitas pengaruh, dan (3) reaksi dari aktor lain; seorang pembuat keputusan paling berkuasa pun harus memperhitungkan kemungkinan reaksi dari aktor-aktor lain. Reaksi disini yaitu kekuatan yang dapat menentang.

Dalam konteks tokoh masyarakat, elit tidaklah di pandang seperti aktivis di atas, tokoh agama adalah orang yang di hormati oleh komunitasnya, (dalam kaca mata kepentingan partai politik, "tokoh masyarakat" adalah sebagai kunci kantong suara untuk kemenangan pemilu). tokoh masyarakat adalah orang yang menjadikan rujukan berpendapat dan berperilaku dari komunitasnya. Tokoh masyarakat bisa saja dari kalangan agamawan seperti ulama, pendeta, pastor, dan lainnya. Pada menjelang musim pemilihan (pemilu) biasanya para politisi melakukan "silaturahmi" atau "sowan", kepada para tokoh masyarakat untuk memperoleh restu mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tokoh masyarakat masih di pandang sebagai elit komunikator politik yang relevan untuk memperjuangkan keinginan para politisi, dan cita-cita partai.

4. Money Politic

Money politik atau politik uang, adalah istilah yang sering masyarakat dengar ketika menyambut pemilihan umum, mengisyaratkan bahwa siapa yang memiliki uang yang banyak dialah yang akan menguasai daerah tertentu dan mengantongi suara banyak. Banyak faktor *money politic* susah untuk di hilangkan di Indonesia ini, mulai faktor politik, budaya, hingga faktor sosial. Dalam pemilu *money politic* biasanya di lakukan oleh kader partai politik, sponsor, simpatisan, ketika menjelang pemilu.

Tidak ada definisi secara tegas membuat terkadang masyarakat bingung untuk memahaminya, bagaimana praktik *money politic* beroperasi. Leo Agustino (2009) menyampaikan bahwa UU no. 32 tahun 2014 yang di gunakan sebagai acuan Pilkada langsung, mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum (normatif). Apakah jika seseorang caleg ketika mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di sebuah acara, dan disitu sang caleg menggunakan uangnya sebagai sponsor acara, yang demikian itu bisa dimasukkan ke dalam *money politics*. Padahal dalam upaya kemenangan pemilu dibutuhkan juga sebuah konsolidasi ke pihak-pihak tertentu dan itu melibatkan anggaran. Garis demarkasi (batas pemisah) antara *money politics* (politik uang) dan *political financing* atau pembiayaan kegiatan politik) masih sangat kabur (Ismawan, 1999). Meskipun demikian bukan tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*. Salah satunya *money politic* bisa di artikan "sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu." Ada pula yang mengartikan *money politics* "sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik

dan kekuasaan." Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999).

Masyarakat secara umumnya memahami *money politic* suatu kegiatan pemberian uang, barang, atau memberi iming-iming sesuatu, kepada masa, kelompok, individu, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya tindakan *money politic* itu di lakukan secara sadar oleh pelaku. Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika di gunakan untuk menganalisis kasus seperti pemberian bahan-bahan pokok oleh elit partai, atau orang tertentu kepada masyarakat. kalau motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya pemberian itu bukan *money politic* walaupun tetap mendapatkan *political gain* dari aktivitas semacam itu.

Ketika sistem pemilu umum legislatif secara langsung pada tahun 2009, membuka maraknya praktik *money politic* hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali hingga ke masyarakat bawah. Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*), praktik *money politic* semakin subur. Sebab sudah di anggap kewajaran, masyarakat tidak tahu akan dampak negatif ke depan. Masyarakat membiarkannya, karena mereka tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif harus di tinggalkan. Pada umumnya menilai *money politic* sebagai sesuatu yang lumrah karena alasan ekonomis, dan sebagian lagi ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul di sebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah meluas ke budaya masyarakat.

Sosiologi politik dalam perspektifnya melihat bahwa, fenomena bantuan politik di pahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas kegiatan permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk di penuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Bisa di katakan bahwa, relasi resiprositas merupakan dasar bagi hadirnya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Ada juga kegiatan *money politic* berwajah lain, yaitu; sering kali di atasnamakan sebagai bantuan, infak, sadaqah, dan lain sebagainya. Pergeseran istilah *money politic* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma budaya masyarakat yang memang menganggap itu sebagai hal yang wajar (lazim) terjadi.

Dalam konteks perkembangan sekarang ini, "demokrasi berubah sebagai suatu situasi tidak ubah seperti pasar yang sangat ramai dengan transaksi penjual dan pembeli." Disini para elit politik menjadi agen-agen yang membeli suara rakyat, sementara itu ada masyarakat di sisi lain adalah pihak yang menjual aspirasinya. Terkadang juga masyarakat tidak serta merta menjual suaranya, pengkondisian terhadap masyarakat pun menjadi penting dengan berbagai isu-isu yang di suplai tim pemenangan partai, itu pun tidak sedikit menggunakan pembiayaannya.

Menurut Sabilal Rosyad (2009), ia membagikan bentuk-bentuk *money politics* ke dalam lima cara tindakan, (berdasarkan hasil dari pengamatannya dalam pemilu legislatif di kabupaten pekalongan 2009), bentuk caranya yaitu: (1) *money politics* dalam bentuk pemberian uang dan barang, (2) *money politics* dalam bentuk Pemberian Melalui

Tokoh Masyarakat, (3) *money politics* dalam bentuk pemberian fasilitas sarana umum, (4) sistem Ijo, (5) *money politics* Serangan Fajar.

Sistem ijo ini di kutip dalam tulisan Sabilal Rosyad (2009), dengan penjelasannya yaitu: sistem ijo hampir sama seperti keadaan rentenir, ketika pemodal memberikan pinjaman uangnya ke yang membutuhkan. Alasan meminjamkan karena bantuan itu memang akan di tarik kembali dalam waktu yang akan datang. Mekanisme seperti ini berlaku pula dalam permainan politik, atau dalam kegiatan *money politic* berbentuk hibah (“pemberian, sedekah”) di waktu yang akan datang hibah politik semacam ini diminta kembali bisa dalam bentuk sikap dukungan politik.

Keberadaan uang memang menjadi faktor urgen yang berguna untuk mengangkat kharisma personal seseorang, sekaligus bisa untuk mengendalikan wacana strategis terkait tujuan politik dan kekuasaan. Di mana seseorang leluasa melancarkan pengaruhnya dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya ke pihak lain melalui bermacam sarana, termasuk uang (Nugroho, 2001). Sedangkan pendapatnya Umam (2006), tidak terkecuali masyarakat religius pun, uang diakui untuk senjata politik yang ampuh, sangat strategis menaklukkan kekuasaan. Oleh karena pada dasarnya, uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Hugh Dalziel Duncan (1997) di kutip oleh Rosyad (2009) menyatakan “barang siapa memiliki uang satu sen, maka ia berdaulat sejauh satu sen” atas seluruh manusia.

Dunia kompetisi politik memang sangat ketat, bisa dikatakan uang disini berperan hanya sebatas instrumen, namun peran penting adalah bagaimana uang di gunakan oleh orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, di tukar atau dikombinasikan dengan sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik, sementara itu menurut Sulistiyo (2000) di kutip dalam Rosyad (2009) justru menangkap fakta ironis di balik budaya politik di Indonesia. Di mana kekuasaan politik di negeri ini justru di fungsikan untuk alat menghasilkan uang, untuk mengembalikan modal politik dan pencarian keuntungan kekuasaan.

Dilihat dari segi faktornya, kenapa praktik *money politics* telah membudaya di Indonesia ketika musim kampanye. (1) Hal ini sangat di pengaruhi oleh faktor ekonomis masyarakat yang dililit kebutuhan sehari hari, dan cara berpikir yang pragmatis. (2) di masyarakat bawah, lebih banyak dikarenakan ketidaktahuan mereka akan dampak kumulatif dari praktik *money politics*. Menurut Masdar Farid (2004), dikuti oleh Rosyad minimnya pemahaman mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap kriminalitas praktik kegiatan suap dan *money politic* itu.

5. Pertukaran Sosial Ranah Politik

Para toko politik, elit masyarakat dan unsur yang lainnya berlomba untuk mendapat simpati masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan kontrak politik. Budaya kontrak politik telah menjadi tren sejak pemilu langsung memilih tahun 2004. Kesepakatan dua kelompok atau lebih dalam kontrak politik tersebut sangat beraneka

ragam. Segala tuntutan yang bersifat regional skala prioritas bagi rakyat setempat harus termuat dalam isi kontrak tersebut, yang kemudian wajib direalisasikan oleh elit partai Politik yang menang. Demikian pula kelompok masyarakat berkewajiban untuk menggalang dukungan sebanyak mungkin dalam rangka menyukseskan dukungannya itu. Secara umum kontrak politik dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang melibatkan para elite partai koalisi, capres dan cawapres dengan partai pengusung, caleg dengan pemilih, dan rakyat dengan pemimpinnya (Biyanto, 2015). Secara umum kontrak politik bisa di golongkan menjadi dua bentuk model. *Pertama*; kontrak politik yang melibatkan antara elit partai dengan unsur-unsur masyarakat. *Kedua*; kontrak politik yang melibatkan sesama partai atau dua kubu partai, atau bahkan lebih.

Fenomena kontrak politik dapat juga dijelaskan dengan kerangka pikir Peter Blau (1964) mengenai teorinya pertukaran sosial (*social exchange theory*). Berdasarkan teori ini, bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Proses pertukaran sosial politik dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak sangat kental. Maka tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai (siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan) menjadi perhatian utama bagi para elit.

Teori *Social Exchange* dari Peter M. Blau. menyatakan bahwa; “pertukaran sosial tidak hanya di dasarkan pada keputusan individu saja, tetapi individu yang masuk membangun hubungan sosial dengan kelompok, sehingga pada individu turut melekat posisi, jenjang, norma kelompok, dan kewenangan-kewenangannya.” (Susilo, 2008). Oleh karena itu sekalipun individu berkuasa merumuskan hubungan sosial itu, tetapi ia tidak bisa lepas dari atribut-atribut yang di miliki kelompoknya.

Peter M. Blau dalam *Social Exchange Theory*, yang diuraikan oleh Keren S. Cook. [1987], dan di kutip ke dalam Rachmad Dwi Susilo (2008) menyatakannya bahwa “organisasi sosial mampu memberikan imbalan kepada manusia secara intrinsik.” Malcolm Waters, mengutip Blau dalam *Modern Sociological Theory*, ia menyatakan “banyak sekali kesenangan manusia yang berakar pada kehidupan sosial.” Partisipasi pada organisasi manusia (organisasi politik, partai politik) sudah menjadi keharusan memerlukan pengorbanan biaya (*cost*), dan kemudian distribusi pengorbanan dan imbalan.

Menurut Peter Blau, pertukaran sosial memenuhi watak-watak dengan fungsi utama (Susilo, 2008), yaitu: *Pertama*; Pembentukan pertalian pertemanan bagi pihak-pihak yang saling membuat persetujuan, baik pada strata (lapisan) yang sama maupun pada strata yang berbeda. *Kedua*; Meneguhkan Subordinasi atau dominasi, terutama terjadi jika interaksi dibangun dalam strata yang tidak sama.

Dalam masyarakat yang paling sederhana, pertukaran sosial terjadi dalam bentuk *gift* (pemberian) dan *services*. *Gift* yang diterima tidaklah secara sukarela, namun di

berikan di bawah *obligation* (kewajiban). Umpamanya seperti kelompok tim sukses dari unsur masyarakat untuk partai politik, kelompok tim sukses partai politik ini menerima *gift* dari partai tertentu, namun ia tidaklah menerima uang semata. Akan tetapi tim sukses ini berkewajiban (*obligation*) mencari masa pendukung dari pesanan sebanyak mungkin, karena ia telah menerima *gift*.

Hasil pertukaran sosial tampak disadari menghasilkan dua kelompok atau lebih yang sangat berkepentingan didasarkan atas memperoleh keuntungan dan kekuasaan. Sisi lain pertukaran sosial adalah meningkatkan integritas sosial, membangun kepercayaan (*trust*), mendorong keberanian dan mengembangkan nilai-nilai kolektif. Dalam kaitan ini Blau menyatakan “resiprositas dan pertukaran diperluas dan digabung dengan pertumbuhan saling percaya yang bersifat paralel” (Susilo, 2008)

Saifuddin yang dikutip oleh Wirawan menyatakan bahwa teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata saja, melainkan hal-hal yang tidak nyata juga bisa dipertukarkan. Ide tentang pertukaran itu juga bisa menyangkut perasaan, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif (Wirawan, 2013).

Di kehidupan sehari-hari kita atau di masyarakat pada umumnya, misalkan menjelang pemilihan umum sering menemui fenomena di lapangan, bahwa ada beberapa unsur masyarakat atau tokoh masyarakat yang melakukan pendekatan dengan tokoh yang bersaing dalam pemilu, atau justru sebaliknya sang peserta dalam persaingan pemilu tersebut melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau ke masyarakatnya. Hal ini dilakukan lebih karena pertimbangan rasional yaitu hubungan yang berorientasi pada saling mendapat keuntungan antara masyarakatnya dan peserta pesaing dalam pemilu. Weber dalam mendefinisikan kekuasaan menganggap bahwa “kekuasaan merupakan kesempatan (mendapatkan keuntungan) individu dalam interaksi sosial untuk mewujudkan keinginannya di dalam suatu tindakan komunal, meskipun melawan arus tantangan dan resistensi individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut” (Mahfud, 2009). Jadi pertukaran yang dilakukan disini adalah untuk mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materi atau status sosial berupa jabatan. Kemungkinan mempertimbangkan *cost-reward-punishment-value* tersebut sesungguhnya merupakan realitas yang tidak bisa kita hindari. Terlebih dalam masyarakat yang serba materialis seperti sekarang, sehingga yang mendasari perilaku adalah pertimbangan ekonomis dan kenyamanan psikologis.

Dalam karyanya George Caspar Homans, yang berjudul *Social Behavior: Its Elementeri Forms* [1961-1974], di dalamnya ada bahasan seperti semakin bernilai anggota kelompok dalam kegiatannya, semakin tinggi status yang mereka berikan sebagai pengembaliannya (berupa keuntungan). Semakin tinggi status seseorang dalam

kelompok, semakin besar kekuasaan di dapatkannya. Semakin banyak pengaruh sebuah kelompok, akan semakin besar kekuasaannya. Nilai adalah apa yang anggota terima dalam bentuk imbalan yang harus di banding dengan status dalam kelompok (Susilo, 2008)

6. Pola-Pola Hubungan Pertukaran Saling Menguntungkan

Bentuk pola-pola hubungan pertukaran sosial terbagi ke dalam beberapa spesifik, tergantung pola tersebut kapan dan seperti apa berlangsungnya, dan apa yang menjadi unsur pendukungnya, sebagai syarat agar pertukaran sosial itu bisa terjadi. Berikut adalah bentuk pola-pola hubungan pertukaran sosial beserta unsur pendukung di dalamnya, yang melibatkan elit partai politik dengan masyarakat sebagai berikut:

- (1) Pola pertukaran sosial yang di dalamnya memuat dana langsung sebagai perangsang adalah pertukaran sosial model lama, hal ini dilakukan sebagai bukti untuk menunjukkan keseriusan oleh elit partai agar proses pertukaran tersebut memang harus berjalan, dan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Bagi masyarakat keuntungan tersebut hanya berdampak pada jangka pendek, sedangkan bagi elit partainya hasil dari upaya itu akan berdampak pada jangka panjang, dan bisa menunjang jenjang kariernya.
- (2) Pola hubungan pertukaran sosial transaksional, melibatkan nama Tenar sebagai sarana utama. Nama tenar di jadikan sebagai pemikat dengan masyarakat luas, ketenaran nama seorang elit di jadikan modal untuk jejang karier politik dari bawah. Nama seseorang elit yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas karena ia sering melibatkan diri dalam berbagai urusan-urusan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi. Keterlibatannya itu baik dalam hal pengurusan, telah menjadi modal investasi untuk memperkuat jaringan. Oleh sebab itu seorang elit yang tidak memiliki modal dana sebagai sumber mobilisasi untuk pendukungnya, tetapi ia memiliki jaringan yang luas sebagai modal utamanya, dan telah di kenal oleh banyak kalangan. Elit yang memiliki modal nama tenar adalah aktor dalam bernegosiasi dan memobilisasi agar memuluskan pertukaran sosial transaksional itu bisa berlangsung, di samping itu juga sebagai pemikat.
- (3) Pola hubungan pertukaran sosial, melibatkan tokoh berpengaruh. Tokoh adalah kunci untuk masuk ke dalam suatu kelompok atau ke dalam suatu masyarakat. Elit partai politik akan lebih memilih tokoh masyarakat yang berpengaruh sebagai mitra komunikasi politik. Secara sederhana tokoh masyarakat elit inilah yang menjabarkan tipologi masyarakat yang ia kenal kepada pihak elit partai politik. Baik dari segi kebutuhan masyarakat, hambatan, peluang, dan potensi masyarakat, tokoh masyarakat inilah yang memahami itu. Elit partai politik hanya mengikuti saran dan masukan dari tokoh tersebut. Ketika kedua belah pihak sudah

menemukan titik temu antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan elit partai, maka hubungan pertukaran sosial itu pun berjalan.

- (4) Pola hubungan pertukaran sosial, dengan pemanfaatan rapat penyerapan aspirasi, berlangsung dengan dua model. Model *pertama*; “rapat penyerapan aspirasi terbuka” melibatkan banyak unsur di masyarakat mulai dari perwakilan petani, pedagang kecil, buruh, unsur pemerintahan Desa, wiraswasta, dan lain sebagainya. Dalam rapat penyerapan aspirasi tersebut hanya ada dua kelompok yang berkepentingan, (1) kelompok kepentingan partai, (2) kelompok kepentingan masyarakat dari berbagai unsur tadi. Model *kedua*; “rapat penyerapan aspirasi tertutup”, yang terlibat di dalamnya dua kelompok kepentingan dari elit partai dan dari elit masyarakatnya saja. Pola hubungan pertukaran sosial tersebut membahas strategi penggalangan massa, dan hal apa yang bisa masyarakat dapatkan, dan elit masyarakat desa bisa dapatkan nanti. Dengan catatan tujuan utama memenangkan kepentingan elit partai terlebih dahulu baru kemudian realisasi kepentingan masyarakat luas.

(5) **Pola Hubungan Pertukaran Sosial , Pemanfaatan Organisasi eksternal**

Organisasi yang potensial memobilisasi massa selain dari unsur tokoh Desa, lainnya adalah peran besar dari keterlibatan pemuda karang taruna dan kelompok ibu-ibu PKK. Maju tidaknya suatu Desa sangat tergantung juga dari upaya kekompakan pemuda, karena peran pemuda di Desa adalah sebagai aktor-aktor suatu kegiatan agar kegiatan tersebut menjadi sukses, oleh sebab itu menyelipkan kepentingan elit partai politik dalam kegiatan-kegiatan karang taruna jauh lebih efektif ketimbang membagi-bagikan dana bantuan ke Desa, (lalu kemudian mengharap ada timbal-baliknya). Demikian pula peran tokoh ibu PKK, tokoh ini bisa memainkan isu-isu keberpihakan kepada elit yang ia dukung. Dalam bentuk pola ini terlebih dahulu sudah jelas baik karang taruna dan kelompok PKK sudah mendapat keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh, baik di saat itu, bersifat jangka pendek, atau keuntungannya nanti ketika figur yang mereka dukung berhasil mendapatkan jabatan.

Inilah beberapa bentuk pola-pola hubungan pertukaran sosial yang terjadi, yang penulis anggap penting, yang pada intinya mempertemukan dua kelompok yang saling berkepentingan dan saling ingin mendapatkan keuntungan masing-masing dalam bingkai politik.. Perilaku transaksional ini terjadi secara alamiah dan terencana dengan berbagai macam warna dan seting keadaan sosialnya. Dan mereka kedua kelompok ini mengharapkan hasil ujung dari upaya itu adalah akan berdampak baik pada diri kelompok mereka. Elit partai mendapatkan kehormatan, jabatan, kekayaan, status sosial, disisi lain masyarakatnya mendapatkan kemajuan Desa, pendapatan ekonomi, jaringan perjuangan, kenyamanan dan kepercayaan yang di titipkan pada elit partai yang sedang berkuasa.

D. Penutup

Pola hubungan pertukaran sosial saling mendapatkan keuntungan bagi partai politik dengan masyarakat, ada dua kelompok yang berkepentingan dalam konteks ini, (1) elit partai politik berkepentingan ke masyarakat, dan (2) masyarakat desa berkepentingan ke partai politik. Bentuk kepentingan elit partai mendapatkan dukungan suara banyak saat pemilu. Demikian juga kepentingan masyarakat, harus mendatangkan manfaat langsung ke desa. Dua kepentingan ini bertemu dalam ruang negosiasi politik transaksional.

Latar belakang kepentingan dua kelompok, masyarakat dan elit partai politik ini, secara spesifik dari elit partai politik berorientasi kepada (1) kekuasaan, yaitu berupaya ingin mendapatkan kekuasaan dengan mekanisme kepartaiannya secara legal dan formal. Randall Collins menyatakan bahwa ada tiga cara individu atau kelompok organisasi mempraktikkan kekuasaan yaitu dengan uang, paksaan, dan membangun solidaritas (Susilo, 2008). Ke (2) ada motif peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk diri sendiri, dan kelompoknya. Dan ke (3) ada latar belakang ideologi yang ingin di perjuangkan oleh elit-elit partai, tentunya ideologi tersebut merepresentasi mesin politik partai yang ia gunakan. Jika mesin partainya PDIP misalkan, maka ideologi PDIP yang akan di bumikan, demikian juga dengan jika elit partai yang lainnya.

Dari elit masyarakat berlatar belakang kepentingan adalah (1) Ekonomi, ekonomi adalah alasan utama infrastruktur itu bisa di implementasikan, oleh sebabnya itu masyarakat disini sangat rasional jika dihadapkan pada politik transaksional. ke (2) ada latar belakang historis. Latar belakang historis adalah sebab terjadinya kenyamanan psikologis sosial, masyarakat lebih muda melakukan pertukaran sosial jika elit partai politiknya itu memiliki kedekatan dengan warga, atau elit politik partai itu adalah figur yang berasal dari kelompok masyarakat. ke (3) ideologi sebagai latar belakang masyarakat untuk melakukan pertukaran sudah menjadi rahasia umum, bahwa kelompok masyarakat mempertimbangkan juga dalam mesin partai tertentu memuat ideologi yang bagai mana. Jika merasa cocok tentunya masyarakat akan bersimpati, jika merasa tidak cocok dengan ideologi yang di bawa partai tersebut maka akan masyarakat menghindari.

Faktor pendorong pertukaran sosial: bagi elit partai politik pada umumnya di pengaruhi oleh sikap politik yang pragmatis, kekuatan figur (kualitas individual) terkadang lemah di mata masyarakat, tidak miliki riwayat kinerja yang banyak. Solusi dari masalah itu adalah mendorong kepopuleran figur tersebut dengan bantuan kekuatan sumber dana. Inilah jalan pintas bagi elit politik yang ingin cepat mendapatkan kekuasaan. Bagi masyarakat, faktor pendorong melakukan pertukaran sosial, di sebabkan juga oleh sikap skeptis ke elitnya. Artinya masyarakat tidak akan menaruh harapan pada elit yang menjabat sebagai perwakilan mereka di tingkat pusat. Masyarakat sudah bosan melihat banyak kelakuan korup yang di pertontonkan. Untuk

mengatasi persoalan ini, dukungan suara politik masyarakat lebih baik di konfeksi menjadi pembangunan yang real untuk pemajuan desa.

Kepentingan pribadi elit partai politik bermuara ke jabatan, kekayaan dan kehormatan. Sedangkan kepentingan atau keuntungan bagi masyarakat lebih dominan pada keuntungan kolektif, artinya keuntungan yang di inginkan masyarakat adalah yang bersifat pembangunan infrastruktur, di mana semua pihak bisa merasakan manfaatnya.

Adapun objek-objek yang di pertukarkan bukanlah benda yang nyata saja, melainkan hal-hal yang tidak nyata juga di pertukarkan Jadi pertukaran sosial itu sangat kemungkinan terjadi tidak hanya ketika menjelang pemilu saja, melainkan setelah pemilu juga bisa terjadi tergantung kesepakatan sesama elit yang melakukan pertukaran sosial tersebut. Dan hal yang di pertukarkan adalah berupa yang bernilai bagi orang yang membutuhkan, dan tidak harus dalam bentuk materi.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arrizal. (2012). *Teori Manajemen Sumber Daya Manusia Membantu Pemimpin Transaksional Memimpin Sumber Daya Manusia Melalui Proses Pertukaran. Manajemen dan Kewirausahaan*, 1.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Biyanto. (2015). *Budaya Kontrak Politik*. Jakarta: Sindonews.
- Bottomore, T. (1996). *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Duverger, M. (1985). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Ismawan, I. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jumari. (2012). *Peran Elit dan Basis Sosial Partai Demokrat dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahfud, C. (2009). *39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia dari Socrates Sampai Barack Obama*. Surabaya: Jaringan Pena.
- Mas'udi, M. F. (2004). *Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqih Anti Korupsi*. Jakarta: P3M.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus, & Aini, N. (2004). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyad, S. (2009). *Praktik Money Politics dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan tahun 2009*. *Artikel*, .
- Soelaeman, M. (1995). *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco.
- Susilo, R. K. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Tawakkal, G. T. (2009). *Peran Partai Politik dalam Memobilisasi Pemilih*. Semarang: UNDIP.

- Umam, A. K. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Widodo. (2002). *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Absolut.
- Wirawan. (2013). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Zuber, A. (2012). Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan: Tinjauan Kritis. *DILEMA*, 10.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik